KULIAH VI

NASIONALISME DALAM SISTEM EKONOMI

Sebelum dunia mengenal system ekonomi kapitalisme abad 18-19 yang merupakan penerapan pemikiran-pemikiran adam smith, ada dua ajaran lainnya yaitu system Merkantilisme dan Fisiokrat. Mahzab pertama ditentang keras Adam Smith tapi mahzab kedua disempurnakan.

Ajaran Merkantilisme sering juga disebut ekonomi nasionalisme yang mementingkan surplus perdagangan luar negeri sehingga Negara menjadi kaya dan kuat karena menumpuk emas. Di dalam negeri buruh diupah sangat rendah. Ketidak bebasan orang dan peranan Negara yang monopolistic ini yang ditentang oleh Adam Smith. Laissez-Farie atau Naturali liberty atau kebebasan ilmiah adalah filsafat dianggap tidak ada dan akan merugikan.

Paham kebebasan ilmiah ini pada abad pertengahan 19 menggantikan system penjajahan Indonesia oleh Belanda. Tahun 1600 s/d 1800 digunakan system merkantilisme, dan tahun 1830-1700 dengan system monopoli Negara yang amat ketat (tanam paksa) melaui system kapitalisme liberal Indonesia benar-benar diekploitasi secara luar biasa. Sehingga Negara belanda menjadi kaya raya dan sebaliknya Indonesia menjadi menjadi sangat melarat. Proses ini kemudian menghasilkan politik etik atau politik balas budi dari pihak pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia (1901). Edukasi, irigasi, dan emigrasi adalah tiga serangkai kebijaksanaan untuk membalas budi.

Upaya balas budi ini malah sebaliknya, digunakan sebagai sarana untuk beroperasinya para investor yang mengejar laba. Peningkatan pendidikan dan perbaikan system irigasi ternyata tetap diarahkan sedemikan rupa agar perusahaan perkebunan besar milik para investpr Belanda lebih besar lagi keuntungannya. Misalnya air pengairan diprioritaskan bagi kebun tebu bukan untuk para petani.

Pada akhirnya semakin menekannya penjajahan terhadap bangsa Indoensia, menimbulkan semangat nasionalisme dari kaum cendekiawan Indonesia yang mulai bermunculan melalui pendidika di Indonesia maupun di Negara Belanda. Dimulai dengan gerakan kebangkitan nasional Boedi Utomo tahun 1908.

Dalam bidang ekonomi gerakan melawan system kapitalisme dimulai tahun 1912 dengan pendirian Serikat Islam dan dalam bidang pendidikan berdiri Muhammadiyah di Yogjakarta.Gerakan ini melahirkan mewarnai program partai-partai politik yang lahir di sekitar Sumpah Pemuda tahun 1928.

Kapitalisme liberalisme yang menghasilkan imprealisme Belanda atas Indonesia merupakan titik tolak semua gerakan nasionalisme yang ingin mendirikan Indonesia yang merdeka.Dan semangat anti kapitalisme dan anti liberalisme ini tertanam kuat dalam hati sanubari para pemuda pemimpin pergerakan kebangsaan sesudah Sumpah Pemuda (1928) sampai proklamasi kemerdekaan tahun 1945.

Dalam era Orde Baru (1966-98) system kapitalisme mendapat peluang untuk berkembang terutama karena kelahiran eknomi Orde Baru bersamaan atau berkaitan dengan larangan paham

komunisme di Indonesia.Ini artinya Negara-negara kapitali Barat dapat secara spontan ikut masuk secara terbuka ke dalam perekonomian Indonesia, baik melalui pinjaman-pinjaman lunak maupun melalui melalui investasi langsung.

Namun ada beberapa waktu di mana sekitar awal tahun 70 an secara radikal mengubah system ekonomi menjadi system kapitalisme Negara yang disebabkan oleh karena krisis juga. Dan ini memberikan hikmah diterapkannya kebijaksanaan ekonomi penghematan dan keprihatinan yang terkendali dengan deregulasi mulai tahun 1983. Deregulasi ini secara umum amat baik karena memberi kesempatan bekerjanya demokrasi ekonomi, karena mekanisme pasar diharapkan bekerja secara baik. Sayangnya kebijakan ini dirusak melalui yang disebut system KKN yang membuat perkecualian-perkecualian dalam pelaksanaan deregulasi. Jadi sering kita mendengar istilah deregulasi yang kebablasan. Sehingga munculah konglomera-konglomerat dalam perekonomian Indoensia yang menyebabkan semakin berkembangnya system kapitalisme yang diatur atau diarahkan (command capitalism).

Nasionalisme dan Demokrasi.

Tidak diragukan lagi bahwa meskipun globalisasi merupakan kekuatan yang tidak dapat dihindari lagi sehingga bangsa Indonesia suka tidak suka harus menerimanya. Namun permasalahannya apakah kita masih menganggap Negara kita benar-benar merdeka atau mungkin merasa kembali dijajah, pada saat adanya program-program penjulaan besar-besaran kepada pihak asing dari BUMN yang vital seperti pelabuhan, kelistrikan, dan mungkin Juga perusahaan besar seperti Pertamina dan PLN

Sepertinya kita kehilangan semangat kebangsaan manakala kita menjual asset-aset besar tersebut kepada pihak asing. Padahal semangat kebangsaan itu adalah salah satu modal utama pembangunan di Indonesia. Memang setelah ekonomi Indonesia sejak Orde Baru menjadi sangat terbuka pada modal asing, sehingga tidak mudah bagi pemerintah untuk memperbaharui kebijakan pembangunan tanpa bersepakat dengan lembaga atau badan internasional misalnya IMF atau Bank Dunia.

Pernyataan mengenai “nasionalisme ekonomi” menjadi jauh lebih terbatas. Sehingga seperti kehilangan kemampuan untuk mengembangakn program-program baru diluar Letter of Intent yang disusun bersama IMF.

Utang dan Pembangunan

Sebenarnya krisis moneter dan krisis ekonomi Indonesia merupakan sebuah kejutan bagi para pakar ekonomi asing, merupakan hal menarik yang dapat dibahas. Setelah krisis yang terutaman diakibatkan oleh pinjaman jangka pendek yang terlalu besar dari sector swasta (57% dari sekitar US$ 150 milyar), banyak usulan agar pemerintah mulai mengendalikan aliran masuk dana-dana asing. Dan bahkan jika mungkin tidak terlalu mudah membuat utang-utang baru. Disini kita harus mulai memikirkan pertimbangan nasionalisme yaitu jangan sampai Indonesia semakin

tergantung pada utang luar negeri yang menurunkan kemandirian ekonomi nasional. Sebab yang lebih sulit adalah investasi dari dana hutang tersebut terkait dengan BUMN yang pengelolaannya mengandung unsure KKN.

Penutup

Semangat kebangsaan (nasionalisme) yang dianut warga Negara suatu bangsa seharusnya tidak memungkinkan siapapun (pejabat atau pengusaha) melakukan tindakan atau mengambil putusan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan jangka panjang ekonomi Indonesia. Bukti-bukti terjadinya KKN yang cukup parah menggambarkan sika yang mengabaikan akibat-akibat buruk KKN ini bagi ekonomi nasional. Keserakahan dalam bentuk utang berlebihan dari para pengusaha swasta atau kebiasaan menggelembungkan biaya proyek, tidak dianggap salah karena semuanya untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tinggi.

Nampaknya dalam system kapitalisme yang semakin mengglobal yang dapat dilakukan hanyalah terbatas berupa himbauan untuk menahan diri sikap serakah dan setiap orang harus mempertimbangkan keadilan dan kewajaran disamping keuntungan dan efisiensi.

Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari ideology bangsa sebagaimana tercantum dalam pancasila. Jika ada yang mempertahankan bahwa ekonomi adalah ilmu yang bebas nilai yang tidak perlu dikaitkan dengan ideology, maka pernyataan tersebut perlu disangsikan.

Ideologi adalah untuk manusia seperti halnya insting bagi binatang.Sistem ekonomi yang dianut bangsa Indonesia merupakan system yang memerlukan aturan-aturan main yang dibenarkan ideology dan kesadaran manusia pribadi yang memaksa orang bekerja keras untuk melaksanakannya.